

TESIS

**NETRALITAS NOTARIS DALAM MEMBUAT
AKTA PERJANJIAN KREDIT**



Diajukan oleh:

MAULIA BELLA SARI

2320216320021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

TESIS
NETRALITAS NOTARIS DALAM MEMBUAT
AKTA PERJANJIAN KREDIT

Tesis
Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh
MAULIA BELLA SARI
2320216320021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025

RINGKASAN

NETRALITAS NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT

Oleh :

Maulia Bella Sari¹, Djoni Sumardi Gozali²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 114 halaman.

Di era globalisasi, kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan dan terus meningkat, berwenang untuk membuat Akta Autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Diantara maraknya kebutuhan dimasyarakat memerlukan dana pinjaman kepada bank sesuai kebutuhan karena masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran hukum dalam melakukan transaksi yang berhubungan atas perikatan demi kepastian hukum. Wewenang notaris merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan kewajiban notaris dalam menjaga netralitas pada pembuatan akta perjanjian kredit dan menganalisa mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika notaris tidak bersikap netral dalam pembuatan akta.

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dari penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder didapat dari penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif analitis*.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Aturan hukum di Indonesia secara tegas mewajibkan notaris untuk menjaga netralitas dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Notaris harus menjamin bahwa isi akta dibuat berdasarkan kesepakatan yang seimbang dan adil, serta tidak mengandung klausul sepihak yang merugikan salah satu pihak. Hubungan kerja antara bank dan notaris sebagai rekanan menimbulkan potensi ketidaknetralan. Kedua, Notaris yang tidak menjaga netralitas pembuatan akta perjanjian kredit dapat dikenakan **sanksi hukum** berdasarkan tingkat pelanggaran. Sanksi berupa administrasi, kode etik, perdata, dan pidana. Ketidaknetralan notaris tidak hanya menciderai kepercayaan publik terhadap profesi, tetapi juga berpotensi **menyebabkan batalnya akta** dan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, sikap profesional, jujur, dan mandiri adalah keharusan dalam menjalankan tugas kenotariatan.

¹ NIM : 2321206320021

² Pembimbing

NETRALITAS NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT

Oleh :

Maulia Bella Sari³, Djoni Sumardi Gozali⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 114 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Notaris, Netralitas, Kredit.

Di era globalisasi, kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan dan terus meningkat, berwenang untuk membuat Akta Autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Diantara maraknya kebutuhan dimasyarakat memerlukan dana pinjaman kepada bank sesuai kebutuhan karena masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran hukum dalam melakukan transaksi yang berhubungan atas perikatan demi kepastian hukum. Wewenang notaris merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan kewajiban notaris dalam menjaga netralitas pada pembuatan akta perjanjian kredit dan menganalisa mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika notaris tidak bersikap netral dalam pembuatan akta. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Aturan hukum di Indonesia secara tegas mewajibkan notaris untuk menjaga netralitas dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Notaris harus menjamin bahwa isi akta dibuat berdasarkan kesepakatan yang seimbang dan adil, serta tidak mengandung klausul sepihak yang merugikan salah satu pihak. Hubungan kerja antara bank dan notaris sebagai rekanan menimbulkan potensi ketidaknetralan. Kedua, Notaris yang tidak menjaga netralitas pembuatan akta perjanjian kredit dapat dikenakan **sanksi hukum** berdasarkan tingkat pelanggaran. Sanksi berupa administrasi, kode etik, perdata, dan pidana. Ketidaknetralan notaris tidak hanya menciderai kepercayaan publik terhadap profesi, tetapi juga berpotensi **menyebabkan batalnya akta** dan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, sikap profesional, jujur, dan mandiri adalah keharusan dalam menjalankan tugas kenotariatan.

³ NIM : 2321206320021

⁴ Pembimbing

NEUTRALITY OF NOTARY IN MAKING DEED OF LOAN AGREEMENT

By:

Maulia Bella Sari¹, Djoni Sumardi Gozali²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 114 pages

ABSTRACT

Keywords : Notary, Neutrality, Loan

In this globalization era, need in the society for Notary's services is inevitable and continuously increasing, because Notary is authorized to make authentic deeds with perfect evidentiary power. Among the widespread need in the society, they need loan from the bank depending on their need, because current society has legal consciousness in doing transaction related to agreement for the sake of legal certainty. Notary's authority is a form of governmental action in serving public needs. The government appoints Notaries not merely for the sake of the Notaries themselves, but for the benefit of the society in a broad sense. The objectives of this research are to study the regulations on the Notary's obligation to maintain neutrality in the making of deed of loan agreement, and to analyze the sanction which can be imposed if the Notary does act neutrally in making deeds. Method of this research is normative legal one. The results of this research are *firstly*, legal regulations in Indonesia expressly oblige the Notary to maintain neutrality in the making of deed of loan agreement. The Notary must guarantee that the content of the deed is made based on balanced and fair agreement, and not containing unilateral clause which harms one of the parties. Working relation between bank and Notary as partner may arise potential of non-neutrality. *Secondly*, Notary who does not maintain neutrality in the making of deed of loan agreement can be imposed legal sanction based on the level of the violation, it can be in the form of administrative, code of ethics, civil, and criminal ones. The Notary's non-neutrality does not only injure public trust to the profession, but also having potential to cause the nullification of the deed and harm one of the parties in the agreement. Therefore, professional, fair, and independent attitude is a must in performing notarial tasks.

Certified by,



¹ Student Number: 2320216320021

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teoritis	33
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI NETRALITAS NOTARIS	
DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT	43
A. Konsep Netralitas Notaris dalam Hukum Positif Indonesia.....	43

B. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-Undangan.	57
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENJAGA NETRALITAS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT.....	68
A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit.	68
B. Jenis dan Mekanisme Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Notaris.	76
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	99

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulia Bella Sari

NIM : 2320216320021

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : NETRALITAS NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN
KREDIT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juni 2025



Yang membuat pernyataan,

Maulia Bella Sari, S.H

NIM. 2320216320021



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

MAULLIA BELLA SARI

2320216320021

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

16 %

Banjarmasin, 8 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Tesis ini
telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal

PEMBIMBING



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 19610619 198603 1 015

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001